

ABSTRAK

Revenge porn adalah tindakan penyebaran gambar atau video yang bersifat intim atau seksual tanpa izin dari orang yang ada dalam konten tersebut, dengan tujuan untuk memperlakukan, menyakiti, atau membalas dendam. Biasanya, konten tersebut awalnya didapatkan dengan persetujuan, seringkali dalam konteks hubungan pribadi yang dekat. Namun, ketika hubungan tersebut memburuk atau berakhir, salah satu pihak menyebarluaskan konten tersebut sebagai bentuk balas dendam. *Revenge porn* dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban, termasuk kerusakan reputasi, masalah psikologis, dan ancaman terhadap keamanan pribadi. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial dan hukum yang signifikan di berbagai negara. Adapun perseteruan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu apakah diperlukan keberadaan pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum teoritis (*teoritical research*), adapun pendekatan naskah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, akan tetapi pengaturan pencabutan hak berinternet belum sama sekali diatur di KUHP lama dan baru sehingga perlu untuk ditambahkan.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Pidana Tambahan, Hukum Pidana, Pencabutan Hak Berinternet

ABSTRACT

Revenge porn is the act of distributing intimate or sexual images or videos without the consent of the person depicted, with the intent to embarrass, hurt, or seek revenge. Typically, such content is initially obtained with permission, often in the context of a close personal relationship. However, when the relationship deteriorates or ends, one party disseminates the content as a form of revenge. Revenge porn can cause significant harm to victims, including damage to reputation, psychological issues, and threats to personal safety. This phenomenon has become a significant social and legal issue in various countries. The issue to be discussed in this thesis is whether additional criminal sanctions, such as the revocation of internet rights, are necessary. This research employs theoretical legal research methods, combining legislative and conceptual approaches. Revenge porn is considered a criminal act under Indonesian law; however, the regulation regarding the revocation of internet rights is not yet covered in both the old and new Criminal Code (KUHP), indicating the need for its inclusion.

Keywords: Revenge Porn, Additional Criminal Sanctions, Criminal Law, Revocation of Internet Rights.